

**PROSEDUR PENAGIHAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma III

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

DWI KUMALASARI

NIM : 2017410850

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

SURABAYA

2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Kumalasari
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Oktober 1998
N.I.M : 2017410850
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Penagihan Atas Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
Surabaya Utara

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing : Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 10 Agustus 2020 Tanggal : 10 Agustus 2020

(Dr. Supriyati, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA) **(Kadek Pranetha P., S.E., MA)**

NIDN : 0710107003 **NIDN : 0708068907**

Ketua Program Studi Diploma 3

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak)

NIDN : 0726117702

***BILLING PROCEDURES FOR MOTOR VEHICLE TAX ARREARS AT THE
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR REVENUE MANAGEMENT
OF THE NORTH SURABAYA REGION***

Dwi Kumalasari

2017410850

E-mail : 2017410850@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research activity include 1) To find out how the procedures for carrying out billing activities on motor vehicle tax arrears carried out by the "Unit Pengelolaan Pendapatan (UPT PPD) Surabaya Utara" 2) To find out and assess and / or evaluate the level of effectiveness of billing activities on motor vehicle tax arrears. 3) To find out whether the implementation of billing activities carried out by "UPT PPD Surabaya Utara" on arrears on motorized vehicles has been carried out in accordance with applicable law. To support the achievement of the objectives of research activities, this research used a qualitative descriptive research implementation method. Descriptive qualitative research itself can be interpreted by conducting research activities based on observations of phenomena or events that take place through looking at primary or secondary data, then the data are identified then conclusions will be drawn on the process of identifying the data that has been carried out. The results of this research activity are that 1) The collection of tax arrears is carried out by issuing bills and distributing to taxpayers of the relevant tax object. 2) The billing activities that have been carried out by the North Surabaya UPD PPD are said to be effective, it can be seen from the decrease in the number of printing billing documents as well as the achievement of revenue realization that is higher than targeted. 3) Billing activities that are carried out are in accordance with instructions and applicable laws.

Keywords : procedure, evaluation, billing, arrears.

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara merupakan salah satu unit atau satuan kerja pengelola keuangan daerah yang memiliki

tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Jawa Timur di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah,

ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat di wilayah Surabaya Utara. Salah satu kegiatan operasional yang menjadi tugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara yaitu kegiatan pemungutan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Surabaya Utara.

Kegiatan pemungutan PKB menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, karena PKB merupakan salah satu unsur yang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam hal melakukan kegiatan pemungutan atas pajak kendaraan bermotor, bukan tidak mungkin bahwa unit kerja akan menghadapi permasalahan – permasalahan yang membuat wajib pajak terlambat membayar atau karena sebab – sebab lain yang mengakibatkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Atas terlambatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak, timbul tunggakan atau tagihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pentingnya mengetahui prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor ini yang bertujuan untuk memenuhi target penerimaan pendapatan asli daerah, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya. (Ruyadi, 2009)

Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Nomor 10 menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau juga dapat disebut Pajak Daerah yang termasuk dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Nomor 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Pemungutan Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pemungutan yaitu sebagai berikut:

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.” Dari kalimat tersebut telah cukup jelas, bahwa penagihan merupakan rangkaian dari kegiatan pemungutan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam metode ini akan diuraikan mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan data-data yang telah diperoleh baik itu data secara primer maupun sekunder. Rancangan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penulisan penelitian.

Dalam pengumpulan data, hal – hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pengamatan atau Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan penagihan dan memotret dokumen–dokumen atau hal lain yang digunakan dalam proses penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di UPT PPD Surabaya Utara.
- b) Wawancara, merupakan teknik dengan melakukan *interview* dan atau konfirmasi secara langsung kepada pihak–pihak yang berwenang atau terkait dengan bagaimana kegiatan penagihan yang dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Surabaya Utara yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan (Bapak Yudi Kurniawan Akbar, S.E., M.M.) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Ibu Mahmudah Ismiyati, S.H, M.A).

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam teknik analisis atas kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Data
2. Melakukan Penilaian atas Tingkat Keefektifan dari Kegiatan Penagihan
3. Mencocokkan dengan Dasar Hukum atau Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun

2017 dan Buku Petunjuk Operasional Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Surabaya Utara didapatkan informasi bahwa teknis pelaksanaan terhadap prosedur penagihan yang dilakukan atas adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang menjadi tagihan oleh UPT PPD Surabaya Utara yaitu didasarkan pada buku petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan. Pada buku petunjuk operasional tersebut, terkait dengan kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor ini terdapat pada bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada poin "Sistem Administrasi Surat Perpajakan".

Buku Petunjuk Teknis Operasional sendiri merupakan buku yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur selaku Badan yang menaungi kerja atau teknis pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur, salah satunya UPT PPD Surabaya Utara. Poin Sistem Administrasi Surat Perpajakan ini didasarkan pada Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur No.193 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur.

Pembahasan

4. Memberikan Kesimpulan.

UPT PPD Surabaya Utara telah melakukan prosedur penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan dasar hukum dan petunjuk yang berlaku. Kegiatan penagihan atas tunggakan PKB di wilayah Surabaya ini dilaksanakan oleh UPT PPD Surabaya Utara atas dasar Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang berdasar pula pada undang-undang hukum yang berlaku yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dalam hal ini, kegiatan operasional yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan yaitu sebagai pelaksana teknis, artinya menjalankan sebagian tugas teknis terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya di wilayah Surabaya Utara. Prosedur penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPT PPD Surabaya Utara telah mengacu pada petunjuk teknis dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur selaku badan yang menaungi kinerja dari UPT PPD Surabaya Utara.

Proses atau alur yang dilakukan dalam melakukan penagihan dimulai dengan dilakukannya percetakan terhadap surat atau dokumen penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang nantinya akan didistribusikan atau disampaikan

kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki tagihan atau kewajiban atas PKB yang belum dilaksanakan atau dibayarkan.

Dari kegiatan distribusi surat tagihan atau kegiatan penagihan tersebut, UPT PPD Surabaya Utara selaku pelaksana teknis akan melakukan rekap atau laporan dari hasil atau kegiatan penagihan. Hasil laporan yang dimaksud yaitu terkait dengan status kepemilikan kendaraan dari objek pajak terkait, misalnya apakah objek pajak yang ditagih tersebut Masih Dimiliki, Telah Dijual, Rusak, Hilang, Kriminal/Laka, atau Alamat dari Subjek Pajak bersangkutan Tidak Jelas (Pindah Alamat). Hasil dari kegiatan penagihan ini yang nantinya akan dapat diketahui bagaimana pengaruh penerimaan atas tunggakan PKB yang terjadi selama tahun 2019.

Kegiatan penagihan yang dilakukan UPT PPD Surabaya Utara atas adanya tunggakan PKB dikatakan efektif. Hal tersebut, dapat dilihat dari target penerimaan PKB dan potensi penerimaan dalam hal ini adalah tunggakan yang akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari UPT PPD Surabaya Utara terdapat jumlah sebesar 279.078 surat tagihan yang tercetak yang didalamnya jumlah potensi penerimaan PKB yang tertunggak sebesar Rp 126.881.520.665. UPT PPD Surabaya Utara menerima realisasi penerimaan pada akhir tahun sebesar Rp378.493.711.411. Berdasarkan dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa UPT PPD Surabaya Utara telah mencapai penerimaan PAD atas PKB melebihi

dari yang ditargetkan. Dalam target penerimaan PKB tersebut terdapat unsur tunggakan atau tagihan atas PKB, yang berarti kegiatan penagihan yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara cukup efektif dan berhasil.

Selain itu, tingkat keefektifan kegiatan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Utara dapat pula dilihat dari perpindahan total atas percetakan dokumen tagihan yang dari SPSOPKB ke NPP lalu ke NPP mengalami penurunan jumlah yang dapat dilihat pada gambar yang terlampirkan di pembahasan. Pada kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa pergerakan dokumen atau surat tagihan rata-rata mengalami penurunan pada jenis dokumen kedua dan ketiga selama masa Januari-Desember pada jenis kendaraan roda dua maupun roda empat.

Hal tersebut dapat pula didukung berdasarkan dari informasi dan keterangan serta pernyataan yang didapatkan dari pihak UPT PPD Surabaya Utara, bahwa kegiatan penagihan ini cukup berpengaruh terhadap piutang atau tunggakan atas pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Utara.

PENUTUP

Kesimpulan dan Implikasi

Kegiatan penagihan atas tunggakan atau tagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara tersebut berjalan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara data target atas PKB dan realisasi penerimaan yang telah

diterima. Selain itu, tingkat keefektifan juga dapat dinilai dari jumlah atas percetakan dokumen penagihan pajak kendaraan bermotor yang mengalami penurunan pada jenis dokumen penagihan yang tercetak. Berdasarkan penelitian mengenai Prosedur Penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Utara, saran untuk peneliti selanjutnya yang menjadikan tugas akhir ini sebagai referensi yaitu:

1. Mengambil topik atau permasalahan yang sejenis dengan objek penelitian atau unit lain yang sejenis.
2. Menggunakan topik mengenai prosedur penagihan atas subjek penelitian atau subjek penagihan yang lain.

Adapun Implikasi yang dapat dilakukan dari pengamatan pada saat penelitian antara lain:

1. Menyusun langkah-langkah nyata dalam upaya meminimalisir adanya tagihan yang menunggak
2. Memperketat prosedur pembayaran dan penagihan agar masyarakat tidak lalai dalam tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

BapendaJatim. (2020). BAPENDA JATIM. Retrieved Mei 23,2020, from Bapenda Jatim Web Site : https://www.dipendajatim.go.id/?page_id=1361

DJP.K. (2020). Direktorat Jenderal Pajak Retrieved Agustus 13,2020, from Direktorat Jenderal Pajak Web Site:

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> .

IAI. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu* . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: JDIH Kemenkeu.

Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Surabaya: JDIH Provinsi Jawa Timur.

Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* , 716.

Kemenkeu.D (2019,109) DJP Kemenkeu. Retrieved April 8,2020, from DJPK Kemenkeu Website :

- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1 .pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)
- Putri, A. R., & Jati, I. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi* , 662.
- Romandana, A. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas* .
- Ruyadi. (2009). Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 61-70.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih. (2008). Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 163.
- Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.